

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL MEWARIS SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010**

**Oleh :  
Lina Irwanti**

Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan suatu hal yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri, tetapi ada beberapa keluarga yang menginginkan seorang anak dengan tidak terikat perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki status anak luar kawin yang akan berdampak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya, hanya memiliki hubungan keperdataan dan hak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya, sesuai dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena adanya ketentuan tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 2012, keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang telah merubah isi dari Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya memberikan kesempatan untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dan bertujuan untuk mempertegas kedudukan anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Oleh karena itu, melalui penelitian hukum ini, menemukan 2 (dua) hal yang bisa dipertegas adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam mewaris dan kedudukan Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010.

**Kata Kunci** : Anak Luar Kawin, Hak Mewaris, Putusan Mahkamah Konstitusi

## **ABSTRACT**

### **THE POSITION OF OUTSIDE MARRIAGE CHILD IN TERM OF INHERITING AFTER THE ISSUANCE OF DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46/PUU/VIII/2010**

**By:  
Lina Irwanti**

The presence of child in a family is the most desired things by every marriage couple, but there are some families who want child without legal marriage binding so that the child has a status as outside marriage child that will be affect the existing of administration relationship with father and father's family and does not have right to inherit from his/ her father, and the child only has administration relationship and inheritance from his/ her mother and mother's family, according to the regulation of Article 43 verse 1 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. Due to the existence of the regulation, then on 17<sup>th</sup> February 2012, the Decision of Constitutional Court Number 46/PUU/VIII/2010 was issued which has revised the content of Article 43 verse 1 of Law Number 1 Year 1974 which principally give opportunity to have administration relationship with father and father's family using science and technology and/ or other evidence according to law.

The writing in this thesis use legal research method and has purpose to emphasize the position of outside marriage child after the issuance of Decree of Constitutional Court Number 46/PUU/VIII/2010. Therefore, through this research, the 2 (two) things that can be emphasized are regarding the position of outside marriage child in inheriting and the position of Article 43 verse 1 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage after the issuance of Decision of Constitutional Court Number 46/PUU/VIII/2010.

**Key Words:** Outside Marriage Child, Inheritance, Decision of Constitutional Court